

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya memberdayakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Berbagai intervensi kesehatan sumber daya masyarakat telah dikembangkan di Indonesia seperti Posyandu (Rusmin et al., 2017). Masyarakat memiliki berbagai lembaga formal, semi formal, dan desa yang melembagakan hidup sehat dan memberikan layanan di luar posyandu yang dapat digunakan ibu untuk kebutuhan hidup sehatnya (Arisanti & Sunjaya, 2016). Posyandu sebagai pelayanan kesehatan meliputi partisipasi social dalam penyelenggaraannya yang dilakukan oleh kader kesehatan yang telah mendapatkan pendidikan kesehatan dasar dari Puskesmas. Tujuan program Posyandu adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kesehatan dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan pola hidup sehat (Aggrainin, 2020).

Imunisasi adalah tindakan pencegahan yang dilakukan dengan sengaja memberikan kekebalan pada bayi atau anak untuk mencegah penyakit guna mencegah terjadinya penyakit menular. Data *World Health Organization* (WHO) menunjukkan bahwa dari 194 negara anggota WHO, 65 diantaranya memiliki cakupan imunisasi Difteri, Pertusis dan Tetanus (DPT) di bawah target global 90%. Diperkirakan 1 dari 5 anak atau sekitar 21,8 juta anak

tidak mendapatkan imunisasi yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Capaian imunisasi rutin mengalami penurunan sejak tahun 2020. Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI dr. Maxi Rein Rondonuwu mendorong terus pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan untuk mengejar target cakupan imunisasi 79,1%. Berdasarkan laporan data imunisasi rutin bulan Oktober 2021, cakupan imunisasi dasar lengkap baru mencapai 58,4% dari target 79,1% (Megasari Al, Yunita Fa, Hutomo Cs, 2022).

Ditingkat *Association South East Asean Nation* (ASEAN) tahun 2012, Amerika Serikat misalnya angka kematian bayinya 32/1.000 kelahiran hidup yaitu hampir 5 kali lipat dibandingkan dengan angka kematian bayi di Malaysia, 2 kali dibandingkan dengan Thailand dan 1,3 kali dibandingkan dengan Philipina sekitar 57% kematian bayi tersebut terjadi pada bayi berumur dibawah satu bulan dan utamanya disebabkan oleh campak, selain itu adalah gangguan perinatal, infeksi saluran pernapasan akut, diare, malaria dan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), 40% disebabkan oleh hipotermi, asfiksia karenaprematuritas, trauma persalinan dan tetanus neonatrium (Hidayah N, Sihotang Hm, Lestari W, 2017).

Data imunisasi di Indonesia oleh Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia untuk anak berusia 12-23 bulan hanya mencapai 58% dari target seharusnya yaitu 93%. Data pada tahun 2019 cakupan imunisasi rutin di Indonesia masih dalam kategori kurang memuaskan, dimana cakupan DPT-3 dan MR pada tahun 2019 tidak mencapai 90% dari target. Padahal, program imunisasi dasar diberikan secara gratis oleh pemerintah di Puskesmas serta Posyandu (Irawati, 2020). Menurut Purnamasari et al (2023) dalam penelitiannya cakupan imunisasi dasar pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dari jumlah sasaran 4.461.341 bayi di Indonesia,

cakupan imunisasi BCG 93,8%, DPT 69,6%, Polio 1 76,6%, Polio 4 92,4%, campak 91%. Dengan angka Drop Out sebesar 43,5%, angka Drop Out ini menggambarkan terdapat sekitar lebih satu juta bayi di Indonesia yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap setiap tahunnya, sehingga berdampak pada cakupan *Universal Child Immunization* (UCI). Selain berdampak pada cakupan UCI bayi yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap akan rentan terserang berbagai penyakit salah satunya adalah penyakit TB Paru. Menurut data Dinas Kesehatan Kab. Lamandau pada tahun 2023 terdapat 25 kasus TB Paru di Kab. Lamandau dan di tahun 2024 meningkat menjadi 28 kasus.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi, bahwa untuk melaksanakannya perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi dasar yang diwajibkan pada bayi usia 0-9 bulan yaitu BCG, Campak, DPT, Hepatitis B, dan Polio. Imunisasi dasar berfungsi memberikan perlindungan dan penurunan resiko morbiditas dan mortalitas terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (Apriliani Im, at all, 2021).

Imunisasi dasar merupakan salah satu cara pencegahan penyakit menular khususnya Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) yang diberikan tidak hanya kepada anak sejak bayi hingga remaja juga pada dewasa. Cara kerja imunisasi yaitu dengan memberikan antigen bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan merangsang sistem imun tubuh untuk membentuk antibodi. Antibodi yang

terbentuk setelah imunisasi berguna untuk menimbulkan kekebalan seseorang secara aktif sehingga dapat mencegah atau mengurangi akibat penularan PD3I tersebut (Yuliati A, Aprilia Ayu Y, 2018).

Pelaksanaan imunisasi yang tidak efektif disebabkan adanya faktor ketidaktahuan, ketidakmampuan dan ketidakmauan keluarga mengenali persepsi mereka terhadap kesehatan, penyebab dan penyakit yang berbeda oleh karena adanya perbedaan latar belakang, pengalaman, sosial budaya, ekonomi, pendidikan antara petugas kesehatan dan masyarakat (Budiarti A., 2019). Fasilitas pelayanan untuk imunisasi telah tersedia di masyarakat, tetapi tidak semua bayi telah mendapatkan imunisasi yang lengkap, imunisasi yang diberikan pada bayi merupakan bagian tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, namun masih ada ibu yang mengatakan bayinya tidak perlu diberikan imunisasi asalkan bayinya sehat, gerakan aktif dan makan makanan bergizi (Rosidah N. 2019).

Hasil observasi penulis tentang penggunaan vaksin BCG di Puskesmas Kabupaten Lamandau diketahui pada minggu pertama persentase vaksin terpakai hanya 11,67% sedangkan sisanya 88,33%, pada minggu kedua persentase vaksin terpakai sebesar 15% dan sisanya 85%, untuk minggu ketiga vaksin terpakai 10% sisa vaksin 90%, dan minggu keempat persentase vaksin terpakai hanya 12% dan sisa vaksin sebesar 88%. Dari data tersebut dapat dipastikan hampir setiap minggu banyak sisa vaksin yang tidak terpakai atau terbuang. Penggunaan vaksin BCG yang tidak efisien menyebabkan tingginya permintaan akan sediaan vaksin BCG dari Puskesmas Ke Dinas Kesehatan.

Patrick G. Ilboudo, et al (2022) menyebutkan biaya ekonomi vaksin dosis tunggal melebihi biaya vaksin *multiple dose*. Hal ini dikarenakan tiga faktor biaya, termasuk biaya vaksin, perlengkapan injeksi, dan penyimpanan mempengaruhi besarnya biaya yang

dikeluarkan jika dibandingkan dengan pemakaian vaksin *multiple dose*. Oleh karena itu dilakukanlah penerapan kebijakan penggunaan vaksin *multiple dose* dengan cara memvaksinasi lebih banyak bayi dalam waktu bersamaan sehingga dapat menyebabkan perubahan menjadi lebih hemat dalam pembiayaan.(Ilbuodo.G, 2022). Salah satu masalah dalam pemberian imunisasi adalah penggunaan vaksin yang kurang efektif. Dimana salah satunya adalah pemberian vaksin BCG yang mana dalam satu vial vaksin bisa digunakan untuk 20 orang hanya di gunakan untuk 2 sampai 5 orang anak. Hal ini dikarenakan titik pemberian imunisasi yang berbeda beda sehingga tidak efektif dalam penggunaan vaksin BCG. Dalam laporan karya kinerja ini penulis ingin meningkatkan efesiensi vaksin BCG untuk meningkatkan efesiensi imunisasi BCG di Kabupaten Lamandau dengan mengumpulkan bayi untuk memvaksinasi lebih banyak bayi dalam waktu bersamaan. Sehingga penggunaan vaksin BCG menjadi efisien.

## **B. Lingkup Pengabdian dan Pengembangan**

### **1. Lingkup Pengabdian**

Saya sebagai penulis karya kinerja, bekerja sebagai petugas Pengelola Layanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kab. Lamandau, saya bekerja di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Bidang P2P memiliki tugas utama untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan operasional terkait surveilans, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa. Sebagai pelaksana Bidang P2P saya memiliki tanggung jawab dalam mengevaluasi dan melakukan monitoring terhadap laporan Pengendalian, Pencegahan,

Penyakit yang ada di unit kerja Puskesmas dan Rumah sakit di Kabupaten Lamandau. Setiap laporan akan dikumpulkan dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi sebagai bahan evaluasi kerja.

Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Konsep dasar kegiatan surveilans meliputi: Pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan interpretasi data, umpan balik, disseminasi yang baik serta respon yang cepat. Bentuk penyelenggaraan Surveilans Kesehatan terdiri: surveilans berbasis indikator dan surveilans berbasis kejadian. Surveilans berbasis indikator Surveilans berbasis indikator dilakukan untuk memperoleh gambaran penyakit, faktor risiko dan masalah kesehatan dan/atau masalah yang berdampak terhadap kesehatan yang menjadi indikator program dengan menggunakan sumber data yang terstruktur. Contoh: penyelenggaraan surveilans *Acute Flaccid Paralysis* (AFP), *Community-Based Monitoring System* (CBMS), Surveilans Gizi, Surveilans penyakit Tuberkolosis Paru (TB), Surveilans Penyakit Kusta dan lain - lain. Surveilans berbasis kejadian Surveilans berbasis kejadian sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menangkap dan memberikan informasi secara cepat tentang suatu penyakit, faktor risiko, dan masalah kesehatan dengan menggunakan sumber data selain data yang terstruktur. Misalnya : pada rumor ataupun Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan atau penyakit.

Kegiatan surveilans yang saya lakukan tidak lepas dari proses pengumpulan data dari berbagai fasyankes yang ada di Kabupaten Lamandau yang terdiri dari 11 Puskesmas dan 1 RSUD. Tahapan pengumpulan data merupakan tahapan yang paling menentukan terhadap arah manajemen data selanjutnya, sehingga dalam proses pengumpulannya diharapkan dapat menghasilkan data yang berkualitas, yaitu data yang relevan (sesuai dengan tujuan pengumpulan data), valid (terbebas dari kesalahan eksternal dan internal), reliabel (konsistensi hasil suatu alat menurut waktu dan orang), lengkap dan tepat waktu.

Kelengkapan data yang sudah terkumpul harus jelas, karena menyangkut bobot terhadap informasi yang dihasilkan. Semakin lengkap data terkumpul akan semakin representatif untuk memberi gambaran sebenarnya, namun hal ini sangat tidak mungkin. Beberapa ahli berpendapat bahwa angka 80% secara umum sudah dapat mewakili, kecuali untuk data yang sifatnya khusus dengan kelengkapan harus 100%. Kelengkapan data yang dimaksudkan disini mencakup isi laporan (item pelaporan), semua jenis kegiatan, unit pelapor wilayah kerja. Dengan adanya informasi tingkat kelengkapan data yang dikumpulkan, kita dapat memperkirakan sejauh mana data yang diperoleh dapat mewakili atau memberi gambaran keadaan yang sebenarnya. Ketepatan Waktu Semakin cepat data diperoleh maka akan semakin cepat pula kita dapat mengetahui atau mendeteksi permasalahan yang dihadapi. Biasanya untuk permasalahan yang sifatnya urgen dan memerlukan tindakan segera maka ketepatan waktu penerimaan data sifatnya mutlak; karena bila terlambat permasalahannya dikhawatirkan akan meluas dan mengancam banyak orang. Misalnya pada peristiwa Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit tertentu yang berpotensi menyebar secara luas dan cepat, maka semakin cepat

data yang tersaji maka akan semakin cepat upaya untuk mengendalikan penyebaran ataupun pemutusan rantai penularannya.

Untuk mengefektifkan penggunaan vaksin BCG perlu dilakukanlah penerapan kebijakan penggunaan vaksin *multiple dose* dengan cara memvaksinasi lebih banyak bayi dalam waktu bersamaan sehingga dapat menyebabkan perubahan menjadi lebih hemat dalam pembiayaan.

## 2. Lingkup Pengembangan

Efisiensi penggunaan vaksin BCG menjadi salah satu masalah dalam efektifitas penggunaan vaksin BCG. Maka dari itu sudah menjadi tugas penulis untuk menciptakan sebuah inovasi yang dapat mengefisienkan penggunaan vaksin BCG. Hasil observasi yang dilakukan, penulis menemukan pemberian vaksin BCG yang mana dalam satu vial vaksin bisa digunakan untuk 20 orang hanya di gunakan untuk 2 sampai 5 orang anak. Hal ini dikarenakan titik pemberian imunisasi yang berbeda beda sehingga tidak efektif dalam penggunaan vaksin BCG. Hasil observasi yang didapatkan, akan ditindaklanjuti menjadi sebuah inovasi yang mendukung efisiensi penggunaan vaksin BCG di Kabupaten Lamandau. Berdasarkan temuan tersebut, penulis berinovasi untuk melakukan peningkatan efektifitas penggunaan vaksin BCG.

### **C. Tujuan Tugas Akhir Program RPL**

#### 1. Tujuan umum

Tujuan umum dalam karya kinerja ini adalah memberikan gambaran efesiensi vaksin BCG untuk meningkatkan cakupan imunisasi BCG Di Kabupaten Lamandau.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Menggambarkan capaian imunisasi BCG sebelum dan sesudah inovasi karya kinerja.
- b. Mampu menggambarkan efesiensi dalam penggunaan vaksin BCG di fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Mampu menggambarkan efektifitas waktu dalam pemberian vaksin BCG di fasilitas pelayanan kesehatan.

### **D. Manfaat Tugas Akhir Program RPL**

#### 1. Institusi Pendidikan

Manfaat dari hasil karya kinerja ini bagi universitas bisa menambahkan salah satu sumber referensi di perpustakaan kampus dan dijadikan salah satu rujukan tentang efesiensi vaksin BCG untuk meningkatkan cakupan imunisasi BCG Di Kabupaten Lamandau.

#### 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Hasil karya kinerja ini menjadikan gambaran bahwasanya efisiensi vaksin BCG untuk meningkatkan cakupan imunisasi BCG Di Kabupaten Lamandau dapat dibuat secara sistematis, dan efektif.

### 3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam di masa mendatang dan bisa berkarya secara kreatif.